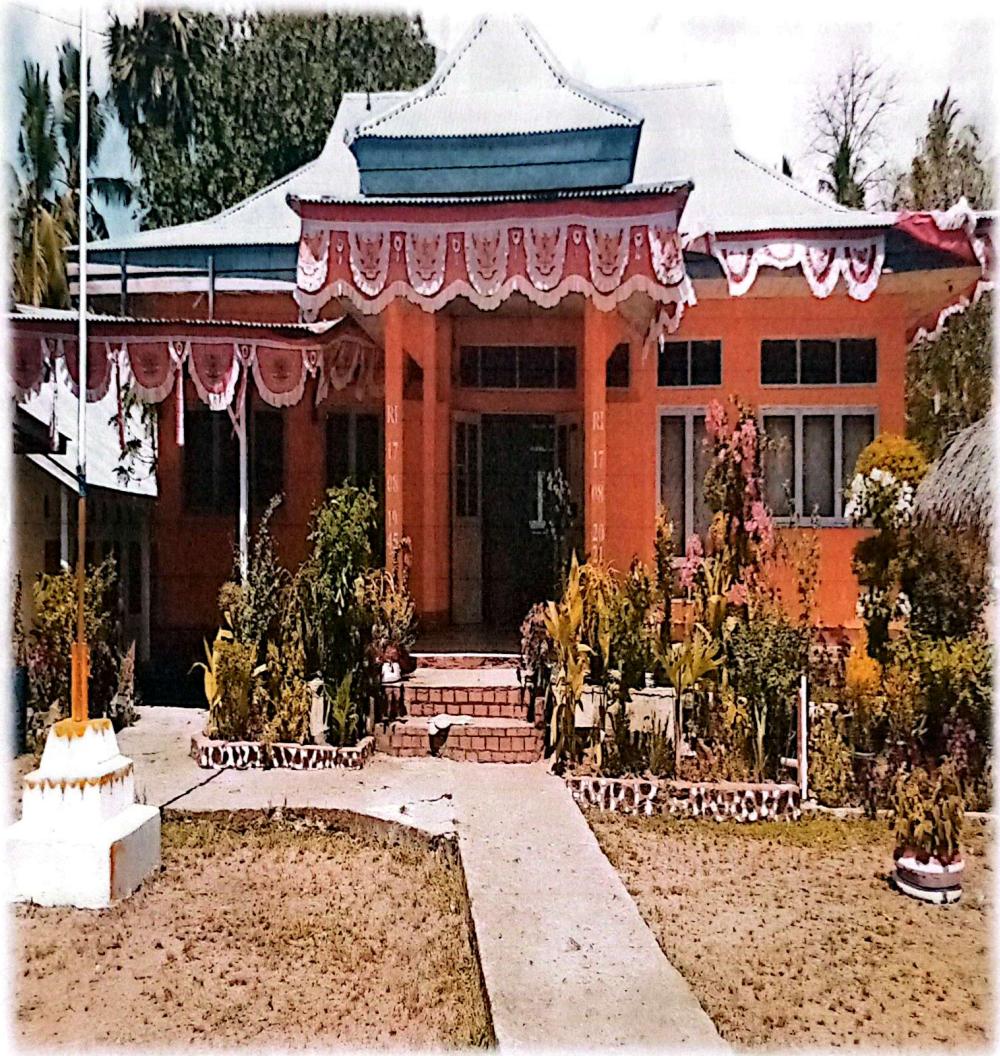




PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN WITIHAMA



RENJA TAHUN 2024

Renja Kantor Camat Witihama 2024

1

KATA PENGANTAR

Puji Dan syukur patut kita panjatkan kehadiratNya, karena atas berkat dan penyertaanNYA, kita diberikan kesempatan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Unit Kantor Camat Witihama.

Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam menggerakkan sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Camat Witihama Tahun 2024 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2024 dan merupakan kewajiban seluruh OPD dalam mendukung program dalam penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2024 yang memuat perencanaan, tujuan,sasaran, program dan kegiatan serta pembiayaan indikator Kecamatan Witihama serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Atas partisipasi semua pihak dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Unit Kantor Camat Witihama Tahun 2024 ini, disampaikan terima kasih, tentunya segala program dan rencana pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kecamatan Witihama yang merupakan bagian penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam implementasinya kedepan perlu terus dievaluasi demi memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan harapan bahwa kemajuan dari waktu ke waktu dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dari seluruh masyarakat dalam pencapaian program maka diperlukan keterlibatan bersama semua pihak dalam semangat gotong royong menukseskan semua program kedepan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.

Witihama, September 2023



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latarbelakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.....	9
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	23
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAAERAH...	25
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2. Tujuan dan SasaranRenja Perangkat Daerah.....	26
3.3. Program dan Kegiatan.....	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	36
BAB V PENUTUP.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah tahunan, sebagai organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan Witihama wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, maka penyusunan Renja PD berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena (1) *secara substansial*, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan pagu indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahunan; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD); (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja urusan pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan (4) *secara faktual*, menjadi tolak akur untuk menilai pencapaian kinerja Perangkat Daerah melalui realisasi program, kegiatan dan subkegiatan.

Renja Kecamatan Witihama Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Witihama untuk periode 1 (satu) Tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sebagai penjabaran tahun kedua dari pelaksanaan Renstra PD Kecamatan Witihama Tahun 2023-2026, Renja Tahun 2024 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Witihama dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

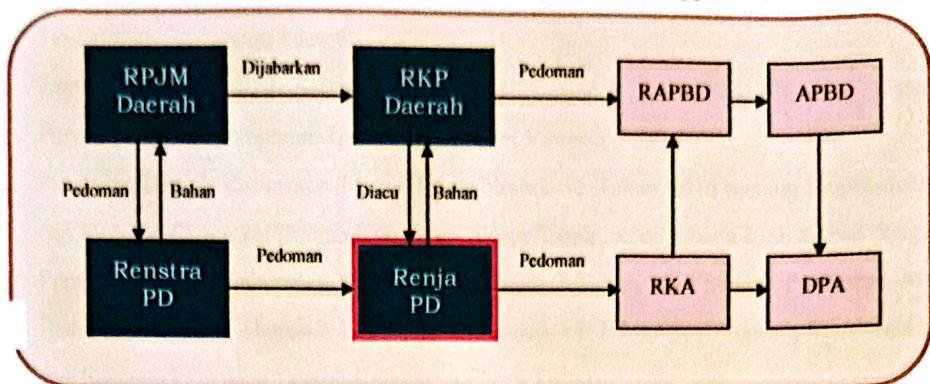
Penyusunan Renja PD Kecamatan Witihama Tahun 2024 dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya berpedoman pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur

Tahun 2024, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Renja PD Kecamatan Witihama dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan, yang meliputi orientasi Renja PD Tahun 2024, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan, dan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja Renja PD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD dan hasil evaluasi kinerja Renja.
3. Penyusunan Rancangan Renja PD dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja PD.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Renja PD, melalui diskusi bersama pemangku kepentingan untuk penajaman kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2023 dan diserahkan ke Bappelitbangda Kabupaten Flores Timur untuk diverifikasi (memastikan keselarasan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD dengan RKPD).
6. Penetapan Renja PD Tahun 2024 dilakukan melalui penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan hasil verifikasi akhir (saran dan rekomendasi) oleh Bappelitbangda Kabupaten Flores Timur.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur, penyusunan Renja PD terintegrasi dalam penyusunan RKPD. Dengan demikian proses penyusunan Renja PD Tahun 2024 merupakan bagian dalam penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan PD tahunan, Renja PD tentunya disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat Daerah (Renstra PD). Selanjutnya pada tahapan penganggaran tahun 2024 (proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/R-APBD), Renja PD tahun 2024 dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA PD Tahun 2024, yang kemudian menjadi bahan dalam penyusunan R-APBD Tahun 2024. Gambaran keterkaitan antara Renja PD tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut;

Gambar 1.1 Hubungan antara Renja PD Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja PD Kecamatan Witihama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Kecamatan.
15. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Witihama Tahun 2023 adalah tersedianya dokumen perencanaan Kecamatan Witihama untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Witihama.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Witihama Tahun 2023 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Witihama.
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Witihama Tahun 2023.
3. Mewujudkan perencanaan Perangkat Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Daerah.
4. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian serta evaluasi kinerja Kecamatan Witihama.
5. Menjadi informasi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Witihama.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kecamatan Witihama Tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan Renja PD, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renja PD.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD sampai tahun 2023, capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta Program dan Kegiatan Prioritas.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Menguraikan Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Witihama Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun 2023 terhadap capaian renstra Kecamatan Witihama Tahun 2023-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Witihama sampai dengan tahun berjalan yaitu tahun 2024 terhadap target di tahun 2024. Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Witihama Tahun 2023-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Kecamatan Witihama Tahun 2023-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2017 s/d 2021 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (tahun n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
ENSTRA 2017 s/d 2022										
	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kab/kota									
	program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kab/kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)							
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)							

						Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)						
x	xx	0 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
x	xx	0 1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dok. Lakip, LPPD, Renja, Renstra, Laporan aset (Dok)	18,500,000	19,723,050	13,399,600	12,204,000	91%	
x	xx	0 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
x	xx	0 1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan	24,498,386	24,498,386	1,169,400,736	916,654,252	78%	
x	xx	0 1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya administrasi jasa keuangan (Bulan)			25,000,000	18,955,000	76%	
x	xx	0 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
x	xx	0 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	101,156,000	-	12,500,000	-	0%	
x	xx	0 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							
x	xx	0 1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan Kantor	7,010,223	2,178,158	2,996,551	1,065,000	36%	
x	xx	0 1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor(unit) Jumlah Peralatan gedung Kantor (unit)	208,400,500	10,000,000	19,250,000	-	0%	

x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dilayani perizinan / jumlah kendaraan dinas yg dipelihara	190,638,480	18,240,000	8,997,565	5,521,730	61%				
x	xx	01	2.08	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yg dipelihara	5,000,000	2,100,000	8,995,000	5,687,500	63%				
x	xx 01 2.08		10		Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yg dipelihara	5,000,000	2,100,000	3,000,000	900,000	30%				
KECAMATAN															
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik										
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yg tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah										
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah fasilitas dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan (kali)	70,794,892	70,794,892	40,985,000	25,005,000	61%				
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum										
7	01	05		2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah										

Renja Kantor Camat Witiharja 2024

x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya						17,241,000	-	0%
x	xx	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yg disediakan								
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg disediakan								
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan administrasi surat menyurat	3,567,080	900,000	-	-	-	1,000,000	300,000	30%
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, air dan Listrik	9,583,200	11,640,000	-	-	-	4,500,000	800,000	18%
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga teknis perkantoran yg disediakan	202,312,000	147,615,000	-	-	-	114,400,000	67,200,000	59%
x	xx	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dilayani perizinan / jumlah kendaraan dinas yg dipeliharaan	190,638,480	18,240,00	-	-	-	4,200,000	1,070,890	25%
x	xx	01	2.08	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yg dipelihara	5,000,000	2,100,000	-	-	-	9,999,900	-	0%
x	xx	01	2.08	10	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yg dipelihara	5,000,000	2,100,000	-	-	-			

Rencana Kantor Camat Witihama 2024

KECAMATAN													
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yg tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah								
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah fasilitas dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan (kali)	70,794,892	70,794,892	-	-	34,999,450	7,741,000	22%
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								
7	01	05		2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah								
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan (orang)	63,888,000	58,800,000	-	-	40,729,220	16,150,000	40%
7	01	06			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								
7	01	06			koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa								

7	01	06	2.01	01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							80,000,000	-	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	jumlah desa yg difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa	36,000,000	51,476,100	-	-	-	20,000,000	3,878,670	19%
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dlm pelaksanaan pemilihan kepala desa								
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	jumlah pelaksanaan Musrenbang desa	46,000,000	8,802,500	-	-	-	25,000,000	15,494,750	62%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis Kinerja pelayanan Kantor Camat Witihama Kabupaten Flores Timur didasarkan pada Program dan Indikator Unsur Kecamatan

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tc 30)

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	-	✓	100	100			100	100			
2	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	-	✓			100	100			100	100	
3	Cakupan Vaksinasi (%)	-	✓			100	100			100	100	
4	Persentase Koordinasi Penyelegaraan Pemerintahan Umum (%)	-	✓			100	100			100	100	
5	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	-	✓			100	100			100	100	
6	Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	-	✓			100	100			100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Witihama periode 2023-2026 adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik;
4. Mengoptimalkan jumlah pegawai yang ada, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
5. Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalani kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan;
6. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;

Pelayanan Prima yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	SDI Pledo-ds Pledo Kec. Witihama	Jumlah gedung yg direnofasi	7 unit	Usulan Musyawarah Desa untuk diterima dan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olaraga
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	SDK Regong-ds. Baobage	Jumlah gedung yg direhab	3 Ruang kelas	Usulan Musyawarah Desa untuk diterima dan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olaraga
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	SDI Woka	Jumlah gedung yg direhab	4 ruang kels dan 1 ruang kantor	Usulan Musyawarah Desa untuk diterima dan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olaraga

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN)Tahun 2020-2024.Pandemi Covid-19 telah berdampak secara Nasional dan melumpuhkan semua sektor kehidupan. Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik.Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan pembangunan nasional tahun 2022 yang selanjutnya menetapkan RKP Tahun 2023 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 2 (dua) fokus pembangunan yakni Pemulihan ekonomi dan Reformasi Struktural. Oleh sebab itu, kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Witihama dalam kurun waktu tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitaspelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,pengawasan, fasilitasi,penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

RKPD Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Untuk itu pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 diarahkan untuk pencapaian sasaran dari setiap tujuan dan misi pembangunan Flores Timur Tahun 2023-2026. Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, Tema Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah "Percepatan Pemulihan" Ekonomi dan Sumber Daya Manusia untuk Mendorong Pertumbuhan Berkualitas" dengan prioritas pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia;
2. Ketahanan Ekonomi Masyarakat;
3. Pengembangan Wilayah;
4. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; dan
6. Reformasi Birokrasi.

Perumusan tujuan, dan sasaran Renja Kecamatan Witihama Tahun 2024 yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan adalah Reformasi Birokrasi. Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran terkait reformasi birokrasi dimaksud maka ditetapkan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan.

Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Pelayanan
Kantor Camat Witihama

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasar an	Tahun Awal (2022)	Target Kinerja			
				Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-	2023	2024	2025
Meningkatka n kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Witihama	Percentase kualitas pelayanan publik	92%	100 %	100 %	100 %	100 %

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja dan pendanaan anggaran kantor Camat Witihama Tahun 2024 disusun dalam rangka penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah dan program fasilitasi pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan witihama dalam mendukung program pembangunan Daerah seperti yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur dan diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor : 11 Tahun 2023; dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3 berikut :

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2004
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kantor Camat Witihama

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				KECAMATAN WITIHAMA								
7.01	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01	01.	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		100%					
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100%					
					Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)			100%				

					<i>Percentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</i>		100%						
7.01	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Percentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/%</i>	Kec. Witihama		38,000,000					89,500,000
7.01	01.	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kec. Witihama	2	12,000,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	2		21,500,000
7.01	01.	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Kec. Witihama	2	8,000,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	2		18,500,000
7.01	01.	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Kec. Witihama	6	8,000,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	6		25,000,000
7.01	01.	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kec. Witihama	2	10,000,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	2		24,500,000
7.01	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,206,356,506					1,197,696,506
7.01	01.	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kec. Witihama	14	1,161,356,506	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	14		1,161,356,506

7.01	01.	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Witihama	12	30,000,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	12	24,840,000
7.01	01.	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Kec. Witihama	7	15,000,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	7	11,500,000
				Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah		Kec. Witihama			Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas		
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD (lap)	Kec. Witihama	2		Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas		
				Administrasi Kpegawaian Daerah								
7.01	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran			73,594,525				73,010,000
7.01	01.	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Witihama	2		Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	2	759,806
7.01	01.	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Witihama	2	7,500,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	2	2,000,000
7.01	01.	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Witihama	2	10,000,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	2	15,560,000

7.01	01.	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Witihama	2	15,000,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	2	9,190,194
7.01	01.	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Witihama	12	15,000,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	12	15,000,000
7.01	01.	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Witihama	12	21,094,525	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	12	30,500,000
7.01	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)			47,000,000				129,550,000
7.01	01.	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Witihama	1	1,000,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	1	250,000
7.01	01.	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Witihama	12	10,000,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	12	4,500,000
7.01	01.	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Witihama	12	36,000,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	12	124,800,000
7.01	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)			26,000,000				8,700,000

7.01	01.	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Witihama	10	10,000,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	10	6,700,000
7.01	01.	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Witihama	1	10,000,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	1	1,000,000
7.01	01.	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Witihama	2	6,000,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	2	1,000,000
7.01				KECAMATAN				142,760,000				228,624,169
7.01.	'02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)			28,000,000				85,256,500
7.01.	'02	'2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				28,000,000				85,256,500
7.01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Witihama	12	28,000,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	12	85,256,500

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Cakupan Vaksinasi /%</i>								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)									
			Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan</i>	16 desa se kec Witihama							
7.01.	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase Koordinasi Penyelegaraan Pemerintahan Umum/%</i>			74,760,000					91,080,952
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				74,760,000					91,080,952
7.01.	05	2.01.	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	16 desa se kec Witihama	1	74,760,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	1	91,080,952
7.01.	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)</i>			40,000,000					52,286,717
				<i>Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)</i>								
7.01.	06		2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40,000,000					52,286,717

					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 desa se kec Witihama						
7.01.	06	2.01	0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 desa se kec Witihama	48	20,000,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	48	20,000,000
7.01.	06	2.01	0009		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 desa se kec Witihama	1	20,000,000	Dana Transfer Umum Dau	Penunjang Prioritas	1	32,286,717

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Witihama Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Witihama Tahun 2024 disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, sub Kegiatan dan Pagu Indikatif
Kecamatan Witihama Tahun 2024

KODE <i>(1)</i>	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN <i>(2)</i>	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (<i>Satuan</i>) <i>(3)</i>	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024					
			RANC AWAL		RANC AKHIR			
			TARGET <i>(4)</i>	PAGU INDIKATIF (Rp,-) <i>(5)</i>	TARGET <i>(6)</i>	PAGU INDIKATIF (Rp,-) <i>(7)</i>	SUMBER DANA <i>(8)</i>	LOKASI <i>(9)</i>
7.	UNSUR KEWILAYAHAN							
	KECAMATAN WITIHAMA			1,754,078,976				
7:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,515,656,506		1,533,711,031		
7:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</i>	100	1,515,656,506	100	1,533,711,031		
		<i>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</i>	100		100			
		<i>Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)</i>	100		100			
		<i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</i>	100		100			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/%</i>	-	78,025,000	-	90,225,000		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	20,225,000	2 Dokumen	20,225,000		

Ranja Kecamatan Witihama 2024

7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	17,500,000	2 Dokumen	20,000,000		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	6 Laporan	15,800,000	6 Laporan	20,000,000		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2 Laporan	24,500,000	2 Laporan	30,000,000		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	1,202,696,506	-	1,207,856,506		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	14 Orang/bulan	1,161,356,506	14 Orang/bulan	1,161,356,506		
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	24,840,000	12 Dokumen	30,000,000		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	7 Laporan	16,500,000	7 Laporan	16,500,000		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	-	93,385,000	-	165,129,525		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	1,250,000	2 Paket	7,500,000		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	2,000,000	2 Paket	5,000,000		

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	15,000,000	2 Paket	20,000,000		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket	12,560,000	2 Paket	20,000,000		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	37,000,000		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	47,575,000	12 Laporan	75,629,525		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)</i>	-	129,550,000	-	44,500,000		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	250,000	1 Laporan	1,000,000		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	4,500,000	12 Laporan	7,500,000		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	124,800,000	12 Laporan	36,000,000		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)</i>	-	12,000,000	-	26,000,000		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	10 Unit	10,000,000	9 Unit	10,000,000		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1,000,000	1 Unit	10,000,000		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	1,000,000	2 Unit	6,000,000		

7:01	KECAMATAN			238,422,470		142,760,000		
7:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)</i>	-	70,064,007	-	28,000,000		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		-	70,064,007	-	28,000,000		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	70,064,007	12 Laporan	28,000,000		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Cakupan Vaksinasi /%</i>	-	15,044,064	-	0		
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		-	15,044,064	-	0		
7.01.03.2.05.03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan</i>	4 Dokumen	15,044,064	4 Dokumen	0		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum/%</i>	-	78,734,514	-	74,760,000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	78,734,514	-	74,760,000		
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	1 Dokumen	78,734,514	1 Dokumen	74,760,000		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	<i>Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)</i>	-	74,579,885	-	40,000,000		

	DESA	<i>Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)</i>						
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	74,579,885	-	40,000,000		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	3 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	0		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	48 Dokumen	20,000,000	48 Dokumen	20,000,000		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	1 Dokumen	34,579,885	1 Dokumen	20,000,000		

BAB V

P E N U T U P

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,bawa setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Witihama Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Witihama Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Selain menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja serta menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Witihama Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Camat Witihama Tahun Anggaran 2024.

